

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di sekolah merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul, baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Sekolah tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya proses belajar mengajar yang bersifat formal, tetapi juga memainkan peran yang sangat strategis sebagai ruang awal pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Dalam konteks kehidupan individu dan masyarakat, pendidikan di sekolah menjadi gerbang awal bagi seseorang untuk memahami dunia, menumbuhkan potensi dirinya, serta mempersiapkan diri menjadi bagian dari komunitas sosial yang lebih luas. Melalui pendidikan, peserta didik diharapkan tidak hanya mampu menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki nilai-nilai luhur seperti toleransi, tanggung jawab, kerja sama, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial yang beragam.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya guna memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam konteks ini, sekolah tidak semata-mata berperan sebagai institusi akademik yang mengejar target nilai dan kelulusan, tetapi juga sebagai lembaga moral yang bertanggung jawab dalam membentuk generasi muda yang berkarakter dan berintegritas. Oleh karena itu, sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.

Namun, idealisme tersebut tidak selalu tercermin dalam kenyataan di lapangan. Dalam praktiknya, lingkungan sekolah kerap kali menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan pendidikan. Salah satu permasalahan serius yang hingga kini masih sering terjadi dan menjadi

perhatian berbagai pihak adalah perundungan atau bullying. Fenomena perundungan di sekolah menjadi masalah kompleks yang tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga mempengaruhi iklim belajar, hubungan sosial antarpeserta didik, serta citra dan reputasi lembaga pendidikan itu sendiri. Perundungan merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu yang dianggap lebih lemah secara fisik, mental, atau sosial. Tindakan ini bisa berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, bahkan melalui media digital atau yang dikenal dengan istilah cyberbullying.

Perundungan dalam lingkungan pendidikan menjadi tantangan besar karena bertentangan dengan nilai-nilai dasar pendidikan itu sendiri. Menurut Sejiwa (2008), perundungan adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Perilaku ini sering kali tidak hanya bersifat sementara, melainkan terjadi secara sistematis dan dalam jangka waktu panjang, sehingga berdampak signifikan terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik korban. Dalam jangka panjang, korban perundungan dapat mengalami gangguan kesehatan mental, kehilangan motivasi belajar, menurunnya prestasi akademik, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Lebih jauh lagi, perundungan merupakan bentuk agresi yang dilakukan secara tidak langsung dan sering kali tersembunyi. Olweus (1993) mengemukakan bahwa perundungan terjadi ketika seorang siswa secara terus menerus menjadi sasaran tindakan negatif dari satu atau lebih siswa lain dalam jangka waktu yang cukup lama. Tindakan negatif tersebut bisa berupa intimidasi, ancaman, pengucilan, pelecehan, atau penghinaan yang menyebabkan korban merasa tidak aman dan tidak nyaman berada di lingkungan sekolah. Fenomena ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara umum, terdapat konsensus di kalangan para ahli bahwa perundungan memiliki karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk

kekerasan atau konflik biasa, yaitu adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, sifatnya yang berulang, serta adanya niat untuk menyakiti.

Bentuk-bentuk perundungan di sekolah sangat beragam, mulai dari perundungan verbal seperti mengejek atau memberikan julukan negatif, perundungan relasional seperti mengucilkan atau menyebarkan gosip, perundungan fisik seperti memukul atau mendorong, hingga perundungan digital yang dilakukan melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat.

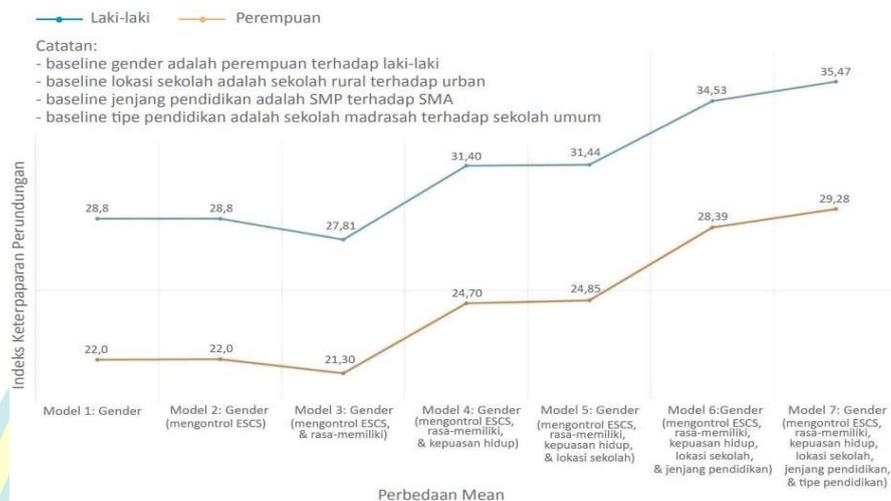


Gambar 1.1 Jenis-Jenis Perundungan dari PISA Tahun 2018

Laporan Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2018 menyebutkan bahwa ketiga bentuk pertama termasuk dalam kategori perundungan tradisional, sementara perundungan digital atau cyberbullying menjadi bentuk baru yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Fenomena perundungan di sekolah-sekolah Indonesia menjadi perhatian khusus karena prevalensinya yang cukup tinggi. Berdasarkan data PISA tahun 2018, sebanyak 39% siswa Indonesia mengaku mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan terakhir sebelum survei dilakukan. Dari jumlah tersebut, 34% mengalami perundungan sosial, 27% mengalami perundungan fisik, dan sekitar 22% mengalami kombinasi dari kedua bentuk tersebut. Jika ditinjau dari jenis kelamin, siswa laki-laki cenderung lebih sering menjadi

korban dibandingkan siswa perempuan, dengan selisih sekitar 7 poin lebih tinggi.



Gambar 1.2 Indeks Keterpaparan Perundungan Menurut PISA Tahun 2018

Kondisi ini menunjukkan bahwa perundungan bukanlah fenomena yang bersifat kasus biasa, melainkan telah menjadi masalah sistemik yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan. Selain laporan dari PISA, UNICEF Indonesia pada tahun 2020 juga merilis data yang menunjukkan bahwa dua dari tiga anak usia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka, baik secara fisik, emosional, maupun seksual. Menariknya, sekitar 75% dari anak-anak tersebut melaporkan bahwa pelaku kekerasan adalah teman sebaya mereka sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa perundungan di sekolah sebagian besar terjadi dalam konteks relasi sosial antarpeserta didik yang seharusnya menjadi ruang belajar dan pengembangan diri yang sehat.

Secara geografis, fenomena perundungan tidak hanya terjadi di daerah terpencil atau miskin akses pendidikan, tetapi juga di wilayah metropolitan seperti DKI Jakarta. Sebagai ibu kota negara dengan kepadatan penduduk dan tingkat heterogenitas yang tinggi, Jakarta menghadapi berbagai tantangan sosial yang turut berdampak pada dinamika kehidupan sekolah. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan berbagai media nasional, kasus perundungan di sekolah-sekolah Jakarta tergolong tinggi dan bahkan telah menelan korban jiwa. Contohnya adalah kasus seorang siswa sekolah

dasar di Jakarta Selatan yang meninggal dunia setelah melompat dari lantai empat gedung sekolah karena mengalami perundungan dari teman-temannya (Kompas.com, 2023). Kasus serupa juga terjadi di SMPN 147 Jakarta, di mana seorang siswa dilaporkan bunuh diri akibat perundungan yang dialaminya di sekolah (BBC Indonesia, 2020).

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perundungan bukan sekadar permasalahan internal sekolah, tetapi juga berhubungan erat dengan kondisi sosial di lingkungan sekitar. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Wilayah ini dikenal dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, kompleksitas sosial-ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap ruang publik yang sehat bagi anak-anak dan remaja. Berdasarkan data dari Polda Metro Jaya, sepanjang tahun 2022 tercatat 323 kasus kenakalan remaja di Jakarta Selatan, meliputi tawuran, mabuk-mabukan, dan balap liar. Sebagian besar pelaku dari kasus-kasus tersebut adalah pelajar tingkat SMP dan SMA, yang mengindikasikan adanya pengaruh timbal balik antara kondisi lingkungan dan perilaku peserta didik di sekolah.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan di sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek. Pertama, faktor individu, yaitu karakteristik pribadi siswa seperti temperamen agresif, rendahnya empati, dan kebutuhan untuk dominasi. Kedua, faktor keluarga, seperti kurangnya perhatian orang tua, pola asuh yang otoriter atau permisif, serta adanya kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, faktor teman sebaya, termasuk tekanan sosial, dinamika kelompok, dan budaya pergaulan yang mendukung perilaku menyimpang. Keempat, faktor media, terutama media sosial, yang sering kali menjadi ruang tanpa pengawasan di mana cyberbullying dapat terjadi secara bebas.

Melihat kompleksitas dan tingginya dampak perundungan, maka sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Sekolah perlu mengembangkan kebijakan dan program pencegahan yang komprehensif, mulai dari edukasi tentang bahaya perundungan, penguatan nilai-nilai karakter, pelibatan orang tua, hingga pengawasan terhadap dinamika sosial siswa di dalam dan di luar kelas.

Pencegahan perundungan tidak bisa dilakukan secara sporadis, melainkan harus menjadi bagian integral dari manajemen sekolah yang berorientasi pada pembentukan iklim belajar yang sehat dan kondusif.

Dalam konteks ini, peneliti memilih SMP Negeri 3 Jakarta sebagai lokasi penelitian karena sekolah ini menunjukkan keseriusan dalam menangani isu perundungan melalui berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan. Berdasarkan hasil observasi awal, SMP Negeri 3 Jakarta memiliki berbagai kegiatan pembinaan karakter, sistem pengawasan siswa yang aktif, serta pendekatan disiplin yang humanis. Selain itu, sekolah ini juga memiliki capaian prestasi yang baik di bidang akademik dan non-akademik, yang mencerminkan adanya sinergi antara pengelolaan manajemen sekolah dan kualitas lingkungan belajar.

Namun demikian, untuk memastikan efektivitas dari upaya-upaya tersebut, diperlukan kajian mendalam tentang bagaimana manajemen pencegahan perundungan dijalankan secara sistematis di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi program pencegahan perundungan dilakukan di SMP Negeri 3 Jakarta. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat peran manajemen sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak.

Dengan demikian, penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik-praktik terbaik dalam pencegahan perundungan melalui pendekatan manajerial yang terstruktur. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif untuk mengatasi perundungan serta meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Intelligentia - Dignitas

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang Manajemen Pencegahan Perundungan (*Bullying*) Di SMP 3 Jakarta. Berdasarkan fokus penelitian maka sub fokus penelitian ini adalah:

1. Perencanaan program sekolah dalam mencegah perundungan di SMP Negeri 3 Jakarta
2. Pengorganisasian program sekolah dalam mencegah kasus-kasus perundungan di SMP Negeri 3 Jakarta.
3. Pelaksanaan program sekolah dalam pencegahan perundungan yang ada di SMP Negeri 3 Jakarta.
4. Evaluasi program sekolah dalam pencegahan terhadap kasus-kasus perundungan yang terjadi di SMP Negeri 3 Jakarta.

C. Pertanyaan Penelitian

Adapun rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan program pencegahan perundungan di SMP Negeri 3 Jakarta ?
2. Bagaimana pengorganisasian terkait dengan perundungan SMP Negeri 3 Jakarta?
3. Bagaimana Pelaksanaan program dalam menangani perundungan di SMP Negeri 3 Jakarta?
4. Bagaimana evaluasi program dalam penanganan perundungan di SMP Negeri 3 Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini;

1. Menganalisis perencanaan program sekolah dalam pencegahan perundungan di SMP Negeri 3 Jakarta.
2. Menganalisis pengorganisasian program sekolah dalam pencegahan perundungan di SMP Negeri 3 Jakarta.
3. Menganalisis pelaksanaan program sekolah dalam pencegahan perundungan di SMP Negeri 3 Jakarta.
4. Menganalisis bagaimana evaluasi program sekolah dalam pencegahan perundungan di SMP Negeri 3 Jakarta.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai kalangan, seperti berikut ini;

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pendidikan khususnya dalam bidang manajemen Pendidikan, yaitu untuk menambah pengetahuan kepala sekolah, guru dan mahasiswa serta masyarakat dalam memahami manajemen sekolah dalam menangani perundungan (*bullying*) di SMP Negeri 3 Jakarta.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi sekolah, Penelitian ini akan menjadi panduan dan masukan bagi sekolah dalam menangani cara yang efektif dalam menangani perundungan di sekolah.
- b. Bagi kepala sekolah, untuk menjadi panduan dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap guru dalam menangani perundungan di sekolah.
- c. Bagi guru, dalam menjalankan tugas dan perannya dapat menjadi bahan acuan sehingga terus berupaya dalam meningkatkan kinerja, keterampilan serta kompetensi dalam menangani peristiwa seperti perundungan yang terjadi di sekolah.

F. Keterbaruan Penelitian

Dalam upaya merumuskan keterbaruan (*novelty*) dari penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan kajian pustaka dan penelusuran berbagai studi terdahulu yang relevan untuk menemukan posisi *state of the art* dari penelitian mengenai pencegahan perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah, khususnya yang berkaitan dengan peran manajemen pendidikan. Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki fokus serupa, yakni mengenai upaya sekolah dalam mencegah dan menangani perundungan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih terbatas pada pendekatan kebijakan atau strategi

umum tanpa secara eksplisit menguraikan proses manajemen pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai satu kesatuan fungsi manajerial yang integral.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya dalam pengelolaan program pencegahan perundungan di lingkungan sekolah menengah pertama. Kebaruan utama terletak pada fokus terhadap implementasi fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi — yang dijalankan secara sistematis dan terpadu oleh pihak sekolah dalam menghadapi fenomena perundungan. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang umumnya menyoroti aspek perilaku peserta didik atau pendekatan psikososial, penelitian ini menempatkan perspektif manajerial sebagai pendekatan sentral. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perundungan tidak hanya memerlukan intervensi pada tataran individu, tetapi juga membutuhkan peran aktif kepala sekolah, guru BK, dan seluruh elemen sekolah dalam merancang strategi pencegahan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif melalui perencanaan program yang terstruktur, pembentukan tim kerja, pengembangan SOP internal, dan pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan.

Kebaruan juga ditunjukkan melalui adanya pemetaan pelibatan stakeholder sekolah (guru, siswa, dan orang tua) dalam pengorganisasian kegiatan, serta mekanisme evaluasi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melalui observasi langsung dan refleksi terhadap dinamika sosial siswa di lingkungan sekolah. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa pendekatan manajerial yang kuat dan terukur menjadi kunci dalam menciptakan iklim sekolah yang aman dan bebas dari perilaku perundungan. Penelitian ini memberikan alternatif model pengelolaan yang dapat dijadikan rujukan bagi sekolah lain.

